

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prospek industri pariwisata di Indonesia sangat besar mengingat negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain itu juga negara Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, sehingga hal tersebut bisa dikemas dan dimanfaatkan sebagai objek wisata budaya berbasis kearifan lokal. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena Sektor pariwisata sudah lama dikenal sebagai sektor ekonomi yang terandalkan hal tersebut dimungkinkan karena cangkupan kegiatannya sangat luas, memperbesar *Multiflier Effect* dalam kesempatan kerja, peluang usaha, dan distribusi pendapatan sehingga sumbangan ekonomisnya sangat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah (pajak/retribusi) maupun pemerintah pusat berupa pajak dan devisa. Melalui komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat dalam mencapai kondisi tersebut, terbuka ruang yang lebih lebar bagi masyarakat (khususnya *local community*) untuk memperoleh distribusi dan redistribusi sumber daya pariwisata (Mastika, 2018: 241).

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Peraturan Menteri

Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016) menjelaskan pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebangsaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kehidupan bangsa. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya yang dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mencakup 4 kriteria yaitu perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan menjelaskan kriteria dan indikator lain seperti Strategi destinasi berkelanjutan, organisasi manajemen destinasi, monitoring, pengelolaan pariwisata musiman, adaptasi terhadap perubahan iklim, inventarisasi aset dan pariwisata, Pengaturan perencanaan, akses untuk semua, akuisisi properti, kepuasan pengunjung, standar

keberlanjutan, keselamatan dan keamanan, manajemen krisis kedaruratan dan promosi.

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah berbagai terminology seperti *sustainable tourism development*, *rural tourism*, *ecotourism* dan *Community Based Tourism* merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Zakaria, 2014: 245). Pariwisata juga terbukti pro terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan, melalui *Community Based Tourism* (CBT), pariwisata mampu menjadi pendorong kemajuan perekonomian rakyat di pedesaan, diantaranya mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, membuka peluang bekerja, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal terhadap pengelolaan sumber daya desa dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Melalui pengembangan desa wisata, pariwisata juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memotivasi masyarakat untuk lebih bangga terhadap identitas budayanya. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah telah berkomitmen menempatkan kepariwisataan sebagai tulang punggung perekonomian negara, dengan menempatkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional (Hermawan, 2017: 589).

Kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan ingin merasakan kehidupan perdesaan serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktivitas sosial budayanya, menyebabkan berkembangnya pariwisata di daerah-daerah pariwisata yang dikemas dalam bentuk desa wisata. Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwidjoyo (2012: 68) Desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan. Baik dari segi kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik. Serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. Komponen kepariwisataan ini misalnya atraksi, akomodasi, makanan atau minuman serta kebutuhan wisata lainnya.

Salah satu konsep dalam pengembangan Desa Wisata adalah *Community Based Tourism* dimana konsep ini adalah sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata diwilayahnya. *Community Based Tourism* adalah sebuah konsep pariwisata yang dimana pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan menggunakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar utama agar masyarakat mampu mandiri dan mampu mengelola potensi pariwisata diwilayahnya secara bersama-sama. *Community Based Tourism* juga mengacu pada kearifan lokal setiap wilayah itu sendiri. (Hadiwijoyo, 2012: 69)

Desa wisata merupakan suatu pemberdayaan ekonomi rakyat pada bidang kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata, perekonomian rakyat perdesaan atau masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan diangkat dengan kegiatan pariwisata berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang sudah ada di daerah perdesaan serta ciri khas budaya setempat. Dengan kata lain, pengembangan kegiatan desa pariwisata tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya (Hadiwijoyo, 2012:70). Dalam pengembangan Desa Wisata masyarakat terjun langsung dalam pengelolaannya, karena yang menjadi daya tarik produk wisata jenis ini adalah tingkah laku, adat istiadat dan budaya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja baru dan memberikan pemasukan pendapatan tersendiri bagi masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat (Purmada, 2016: 16).

Desa wisata menjadi wadah bagi masyarakat yang terdapat pada desa tersebut untuk lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki, agar dijadikan sebuah alternatif pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam

bidang pariwisata. Desa wisata adalah sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative masih asli, selain itu beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata (Yoeti, 1996:68).

Pengembangan kawasan yang berpotensi menjadi Desa Wisata telah menjadi Rencana Strategis Nasional (Retranas) pemerintah dibawah Kementrian Pariwisata Republik Indonesia sebagai perwujudan salah satu amanat peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana Induk pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dimana dalam pasal 14 ayat 1 dijelaskan tentang Daya tarik wisata budaya yang berbasis perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2018 Bab V pasal 6 menjelaskan bahwa pengelolaan objek wisata desa merupakan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu desa memiliki wewenang dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata berbasis kearifan lokal baik itu wisata budaya maupun wisata alam yang ada di desa. Pengembangan dan pengelolaan desa wisata merupakan salah satu program

inovasi desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya program tersebut diharapkan pengembangan dan pengelolaan desa wisata akan semakin baik serta berkelanjutan.

Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan alam melimpah dan sangat potensial untuk pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam dan kearifan lokal. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi destinasi pariwisata berbasis alam dan kearifan lokal yaitu Kecamatan Tukur. Kecamatan Tukur adalah kecamatan yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam serta masyarakat yang multikultural. Banyak tempat wisata yang ada di kecamatan Tukur diantaranya yaitu Bakti Alam, Bukit Flora dan Hutan Pinus. Kecamatan Tukur memiliki 12 desa, namun ada beberapa desa yang menjadi desa wisata, salah satunya adalah desa wisata Kayukebek. (<https://www.pasuruankab.go.id/pages-1>)

Kayukebek adalah desa yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat beragam, masyarakatnya juga multikultural karena sebagian masyarakat di Kayukebek tidak hanya beragama Islam namun juga beragama Hindu. Desa Kayukebek terkenal dengan penghasil tanaman buah apel, dimana kebun apel milik petani ini sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Karena adanya potensi tersebut, pada tahun 2018 pemuda karang taruna bersama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) berkolaborasi membuka wahana wisata baru

yaitu Coban Waru dan Wisata Petik Apel, keunikan dari paket wisata ini pengunjung bisa memetik buah apel langsung dari Kebunnya serta bisa menikmati pemandangan yang ada di Coban Waru. Selain wisata Coban Waru dan wisata Petik Apel, di Desa Kayukebek juga ada wisata alam dan religi yaitu Wisata Pemandian Sendang Sri Alam Sari. Dibalik potensi yang ada, desa wisata Kayukebek belum dikelola dengan optimal, karena masih ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan wisata yang ada di desa kayukebek seperti tata administrasi yang masih kurang maksimal (karena belum dibentuk Pokdarwis dan struktur kepengurusan secara tertulis), kurangnya variasi inovasi wisata, belum tersedianya transportasi umum yang dapat langsung terjangkau ke lokasi wisata, kurangnya perannya pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dan faktor cuaca.

Oleh karena itu diperlukan strategi dan kalaborasi dari para aktor Desa Kayukebek dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal agar tetap menjadi objek wisata yang berkelanjutan. Peran aktif masyarakat, pemerintah dan bahkan swasta diperlukan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan serta kelestarian sumber daya alam yang ada di desa wisata tersebut. Strategi, kalaborasi dan pengemasan paket wisata perlu direncanakan dan dikelola dengan baik agar suatu desa wisata mempunyai nilai jual terhadap wisatawan. Paket-paket yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan sebuah tantangan yang tidak dapat ditemukan di desa lainnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengembangan Desa Wisata dengan judul ***Calloborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Local Wisdom di Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana strategi pengembangan desa wisata dengan nilai kearifan lokal di desa Kayukebek?
- 2) Bagaimana proses kalaborasi yang dilakukan para aktor desa Kayukebek dalam pengembangan desa wisata ?
- 3) Bagaimana peran para aktor desa Kayukebek dalam mengembangkan inovasi desa wisata ?
- 4) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata di Kayukebek ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan desa wisata dengan nilai kearifan lokal di desa Kayukebek.
- 2) Untuk mengetahui proses kalaborasi para aktor desa Kayukebek dalam mengembangkan desa wisata.
- 3) Untuk mengetahui peran para aktor desa Kayukebek dalam mengembangkan inovasi Desa Wisata..

- 4) Untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam pengembangan Desa Wisata di desa Kayukebek.

1.4 Manfaat Penelitian

1.3.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kalaborasi dan strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

1.3.2 Secara Praktis

1). Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam pelaksanaan kalaborasi dan strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

2). Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses kalaborasi pengembangan desa wisata yang ada di Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

3). Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mendalami proses kalaborasi dan strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

4). Bagi Pihak Swasta

Dapat dijadikan referensi dan masukan bagi pihak swasta yang ingin melakukan proses kalaborasi dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan

